



Efektivitas Aplikasi Cek Bansos Dalam Mendukung Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Di Kabupaten Pasaman Barat

Siska Rina¹⁾, Aldri Frinaldi²⁾

Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding author: siskarina8782@gmail.com

Abstrak

Tata kelola data kesejahteraan sosial secara konvensional seringkali lambat dan kurang transparan, sehingga memicu kesalahan sasaran penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas aplikasi bantuan sosial berbasis digital dalam mendukung implementasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan empat fitur utama pada aplikasi ini berhasil mentransformasi tata kelola data menjadi lebih partisipatif, terbuka dan akuntabel. Temuan di lapangan, berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Pendamping Sosial, membuktikan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam memperbarui data kelayakan secara mandiri. Data tersebut kemudian divalidasi menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi melalui verifikasi berjenjang dari tingkat nagari hingga pemerintah pusat. Kesimpulannya, inovasi digital ini sangat efektif dalam menekan angka kesalahan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah disarankan untuk mempercepat pemerataan literasi digital pada kelompok masyarakat rentan dan memperkuat kapasitas aparatur tingkat nagari guna mengoptimalkan keberlanjutan kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Kata kunci: Bantuan Sosial; Data Tunggal; Kemiskinan Multidimensi; Partisipasi Masyarakat; Transformasi Digital

Abstract

Conventional management of social welfare data is often slow and lacks transparency, which frequently triggers mis-targeting of beneficiaries. This study aims to analyze the effectiveness of a digital-based social assistance application in supporting the implementation of the National Single Socio-Economic Data (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) policy in West Pasaman Regency. This research utilizes a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and document reviews. The collected data were analyzed using an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the availability of four main features within the application has successfully transformed data management to be more participative, open, and accountable. Field findings, based on the statement from the Head of the Social Facilitator Team, prove that the level of public participation is exceptionally high in independently updating their eligibility data. The data is subsequently validated using a multidimensional poverty approach through a tiered verification process from the nagari (village) level up to the central government. In conclusion, this digital innovation is highly effective in reducing the error rate in the distribution of social assistance. The local government is recommended to accelerate the equitable distribution of digital literacy among vulnerable groups and strengthen the capacity of the nagari-level apparatus to optimize the sustainability of well-targeted social protection policies.

Keywords: Digital Transformation; Multidimensional Poverty; Public Participation; Single Data; Social Assistance.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda penting dalam modernisasi pemerintahan di berbagai negara. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan menuju layanan yang lebih responsif, efektif, dan efisien. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menuntut perubahan mendasar pada arsitektur proses kerja, tata kelola, dan pergeseran orientasi pelayanan kepada masyarakat (Criado et al., 2021). Di Indonesia, komitmen terhadap transformasi digital diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan integrasi layanan digital nasional guna meningkatkan kualitas pelayanan public Perpres No 82 Tahun 2023 (P. R. Indonesia, 2023).

Dalam kerangka tersebut, konsep e-government berkembang sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di era digital ditandai oleh kemudahan akses publik, peningkatan transparansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta penguatan akuntabilitas penyedia layanan (Wardana & Prabawati, 2024). Pemanfaatan platform elektronik terintegrasi memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang jauh lebih responsif dan inklusif (Alfayn, 2022).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial, terutama dalam sektor perlindungan sosial karena berkaitan langsung dengan distribusi sumber daya negara. Efektivitas program jaminan sosial sangat bergantung pada kemampuan sistem data dalam mengidentifikasi secara akurat sasaran penerima manfaat, sehingga meminimalkan intervensi bantuan yang salah sasaran (Cahyadi et al., 2020).

Meskipun demikian, pengelolaan bantuan sosial sering menghadapi permasalahan sistemik seperti duplikasi data, lambatnya pemutakhiran, serta kesalahan inklusi (*inclusion error*) dan eksklusi (*exclusion error*). Kondisi ini menunjukkan bahwa presisi data kesejahteraan merupakan variabel absolut penentu keberhasilan penyelenggaraan jaminan sosial. Sebelum inovasi digital diterapkan, masyarakat yang mengusulkan diri sebagai penerima bantuan sosial terhambat oleh jauhnya rentang kendali birokrasi, tingginya biaya transportasi dari daerah pelosok, serta terbatasnya kapabilitas operator di tingkat nagari.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan reformasi tata kelola data melalui integrasi lintas sektor menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Pengelolaan basis data ini diatur secara khusus melalui Permensos No. 3 Tahun 2025 (K. S. R. Indonesia, 2025) tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Kementerian Sosial, 2025). Regulasi ini mewajibkan adanya sinkronisasi pembaruan data secara akurat dan partisipatif guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) (OECD, 2020).

Kementerian Sosial kemudian mengakselerasi aplikasi Cek Bansos guna membuka ruang partisipasi publik dalam pembaruan DTSN. Fitur "Usul dan Sanggah" merepresentasikan nilai New Public Service di ranah digital, di mana masyarakat diposisikan bukan sebagai konsumen pasif, melainkan sebagai kolaborator aktif dalam mengawal layanan publik (Abidin, 2025).

Di Kabupaten Pasaman Barat, dengan kondisi topografis dan geografis yang tersebar, kehadiran aplikasi ini sangat esensial. Namun, implementasi teknologi publik sering kali menemui hambatan pada aspek kapasitas pengguna dan infrastruktur organisasi (Ciancarini et al., 2023).

Meskipun kajian mengenai transformasi digital dalam tata kelola bantuan sosial telah banyak dilakukan, tinjauan literatur menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai tata kelola bantuan sosial masih berfokus pada evaluasi implementasi e-government secara makro atau terbatas pada analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi konvensional (Alfayn, 2022). Kajian empiris yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas aplikasi berbasis partisipasi publik seperti Cek Bansos dalam kerangka regulasi yang paling mutakhir, yakni transisi menuju DTSN berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025, masih sangat minim ditemukan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap aplikasi Cek Bansos bukan sekadar sebagai instrumen teknologi, melainkan sebagai katalisator *collaborative governance* dalam implementasi awal DTSEN di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan Kabupaten Pasaman Barat sebagai lokus penelitian memberikan nilai empiris yang kuat. Karakteristik geografis Pasaman Barat yang beragam (mencakup pesisir, perkebunan, hingga pedalaman) serta dinamika sosial ekonomi masyarakatnya menghadirkan tantangan tata kelola yang unik dan berbeda dari wilayah perkotaan, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bagi literatur administrasi publik lokal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas aplikasi Cek Bansos dalam mendukung implementasi DTSEN di Kabupaten Pasaman Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam implementasi aplikasi Cek Bansos sebagai instrumen pendukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, proses, serta pengalaman para aktor yang terlibat dalam suatu fenomena sosial pada konteks yang alamiah (Sugiyono, 2022). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mekanisme pengelolaan data, keterlibatan para pemangku kepentingan, serta dampak penggunaan aplikasi Cek Bansos terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan sosial.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2026. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial dan pelaksanaan program bantuan sosial. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan aplikasi Cek Bansos dalam mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta memiliki karakteristik geografis yang beragam sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks transformasi digital pelayanan sosial.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi aplikasi Cek Bansos dan pengelolaan DTSEN. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Koordinator Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pasaman Barat, Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat, pendamping sosial, operator SIKS-NG, serta masyarakat pengguna aplikasi Cek Bansos.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme implementasi aplikasi Cek Bansos, proses pemutakhiran data DTSEN, peran para pemangku kepentingan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan data kesejahteraan sosial dan pemanfaatan aplikasi Cek Bansos di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa regulasi, laporan kegiatan, dokumen kebijakan, pedoman operasional, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan DTSEN dan aplikasi Cek Bansos.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2020), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul selama proses penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas, validitas, dan keandalan temuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sebelum Implementasi Aplikasi Cek Bansos

Sebelum hadirnya inovasi digital dalam pelayanan kesejahteraan sosial, masyarakat yang ingin mengusulkan dirinya atau anggota keluarganya agar masuk ke dalam basis data kemiskinan umumnya harus mendatangi kantor Dinas Sosial atau kantor nagari secara langsung. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terisolir, maupun wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi di Kabupaten Pasaman Barat. Jarak tempuh yang jauh dan biaya yang harus dikeluarkan sering kali menjadi hambatan birokratis bagi masyarakat dalam mengakses layanan sosial.

Pada tingkat nagari, meskipun telah tersedia akses melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan teknis dan administratif. Tingginya pergantian sumber daya manusia pengelola serta terbatasnya kapasitas aparatur nagari menyebabkan pemutakhiran data berjalan stagnan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Wardana & Prabawati, 2024) yang menyatakan bahwa pelayanan publik konvensional sering kali terjebak pada patologi birokrasi dan rentang kendali yang panjang, sehingga menghambat terwujudnya tata kelola yang responsif. Akibatnya, ketergantungan masyarakat terhadap aparatur sangat tinggi, yang pada gilirannya memperbesar potensi kesalahan inklusi (*inclusion error*) maupun kesalahan eksklusi (*exclusion error*) dalam penyaluran bantuan sosial.

2. Implementasi Aplikasi Cek Bansos sebagai Inovasi Layanan Publik

Sebagai respons terhadap kendala geografis dan birokratis tersebut, Kementerian Sosial meluncurkan aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses melalui gawai pintar. Inovasi ini selaras dengan tren global transformasi pemerintahan digital yang berorientasi pada kemudahan akses (*citizen-centric services*) (Criado et al., 2021). Berdasarkan arsitektur digitalnya, aplikasi Cek Bansos tidak hanya sebatas instrumen pengaduan, melainkan sistem pengawasan terpadu yang dilengkapi dengan empat fitur utama. *Pertama*, Profil Pengguna, yang mewajibkan verifikasi identitas (e-KTP dan swafoto) untuk memastikan akuntabilitas pelapor dan mencegah pelaporan anonim yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, fitur Cek Bansos (Pencarian) yang memungkinkan masyarakat melacak daftar Penerima Manfaat (PM) di tingkat nagari secara *real-time*. *Ketiga* dan *keempat* adalah fitur Daftar Usulan (Usul) dan Tanggapan Kelayakan (Sanggah) yang memberikan ruang otonomi bagi masyarakat untuk mengintervensi kelayakan data penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Risanti Kumala Dewi selaku Koordinator Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pasaman Barat (01 Juni 2026), aplikasi Cek Bansos dinilai sangat efektif karena memberikan ruang otonomi tersebut. Namun, pada awal implementasinya di Pasaman Barat, tingkat pemanfaatan aplikasi ini masih rendah akibat kesenjangan literasi digital (*digital divide*). Menyadari kondisi tersebut, sejak tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat secara aktif melaksanakan kegiatan *coaching clinic* dan sosialisasi ke berbagai nagari. Langkah ini membuktikan bahwa keberhasilan *e-government* tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan ekosistem sosial dan literasi masyarakatnya (Ciancarini et al., 2023).

3. Mekanisme Pengelolaan Data dan Kolaborasi Antaraktor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data melalui aplikasi Cek Bansos melibatkan jejaring aktor yang terintegrasi: masyarakat, pemerintah nagari, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, hingga pendamping sosial di lapangan. Mekanisme ini merupakan manifestasi nyata dari

collaborative governance, di mana penyelesaian masalah publik tidak lagi dimonopoli oleh satu institusi (Astuti, 2026).

Alur data diawali dari usulan masyarakat di aplikasi yang kemudian diverifikasi oleh pemerintah nagari melalui penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Usulan yang disetujui nagari diteruskan untuk proses *approval* oleh Dinas Sosial, disahkan oleh Bupati, dan dikirim ke Pusdatin Kementerian Sosial. Selanjutnya, data tersebut dikembalikan ke tingkat daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Mobile (SIKSMA) agar pendamping sosial dapat melakukan verifikasi faktual (*ground checking*). Menurut keterangan Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial (wawancara, 02 Juni 2026), mekanisme berjenjang ini menegaskan bahwa validasi digital tetap memerlukan verifikasi sosiologis di lapangan guna memastikan integritas data.

4. Implementasi DTSEN dan Penetapan Desil Kesejahteraan Secara Multidimensi

Aplikasi Cek Bansos menjadi instrumen krusial dalam menyokong transisi menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan amanat Permensos No. 3 Tahun 2025. Masih terdapat miskonsepsi di masyarakat yang mendefinisikan kemiskinan secara tunggal berdasarkan pendapatan (Kabid Dinsos, Irman, wawancara 30 Mei 2026). Padahal, kerangka DTSEN mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi (*multidimensional poverty*).

Penentuan tingkat kesejahteraan dievaluasi berdasarkan indikator komprehensif, mencakup kelayakan hunian, aset, daya listrik, jenis pekerjaan, hingga kerentanan keluarga. Hal ini sejalan dengan Cahyadi et al. (2020) yang menegaskan bahwa pengukuran kelayakan jaminan sosial harus mempertimbangkan ketahanan (*resilience*) keluarga terhadap guncangan ekonomi, bukan sekadar angka penghasilan. Melalui kolaborasi lintas lembaga, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemeringkatan secara statistik (desil 1 hingga 10), yang kemudian disinkronkan dengan laporan *ground checking* dari pendamping PKH di Pasaman Barat. Praktik ini merupakan wujud konkrit dari *evidence-based policy* dalam administrasi publik mutakhir (OECD, 2020).

5. Dampak terhadap Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Kehadiran fitur-fitur komprehensif dalam aplikasi Cek Bansos memberikan dampak transformatif terhadap penguatan transparansi dan open data di tingkat lokal. Melalui fitur pencarian (Cek Bansos), tabir kerahasiaan data kemiskinan yang selama ini sering memicu kecurigaan di tengah masyarakat berhasil dibuka. Publik dapat memantau langsung siapa saja tetangga atau warga di nagarinya yang menerima bantuan sosial. Keterbukaan informasi ini secara langsung menstimulasi keberanian masyarakat untuk menggunakan fitur Usul dan Sanggah, sehingga mereka beralih peran dari sekadar penerima manfaat (*beneficiaries*) menjadi pengawas jalannya kebijakan (*co-creators*).

Temuan di lapangan menunjukkan pencapaian partisipasi yang signifikan. Berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Pendamping Sosial Kabupaten Pasaman Barat, diperkirakan sekitar 80 persen usulan pembaruan data kesejahteraan yang masuk saat ini bersumber dari partisipasi mandiri masyarakat via aplikasi Cek Bansos. Tingginya angka ini didorong oleh preferensi masyarakat yang lebih memilih kepraktisan pembaruan data melalui aplikasi baik secara mandiri maupun dengan pendampingan dibandingkan harus menempuh alur birokrasi konvensional ke kantor wali nagari. Hal ini membuktikan efektivitas integrasi fitur-fitur aplikasi tersebut dalam memangkas alur birokrasi, menekan angka *inclusion error* (melalui fitur Sanggah) dan *exclusion error* (melalui fitur Usul), sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara di sektor sosial.

6. Analisis Teoritis

Secara teoritis, keseluruhan temuan empiris di atas mengonfirmasi validitas paradigma *New Public Service* (NPS) di era digital. Kebijakan reformasi birokrasi dan layanan elektronik menempatkan masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek dan mitra kolaborator untuk menciptakan *good governance* yang berkeadilan (Abidin, 2025). Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan ruang otonomi untuk mengintervensi data kesejahteraan yang sebelumnya terpusat dan tertutup.

Dari kacamata *collaborative governance*, integrasi sistem dari nagari, kabupaten, hingga pusat (BPS dan Kemensos) dalam kerangka DTSEN membuktikan bahwa ketepatan sasaran kebijakan sosial memerlukan sinergitas lintas sektoral yang kuat (Astuti, 2026). Lebih lanjut, penggunaan parameter desil multidimensi memperkuat prinsip *evidence-based policy*, di mana intervensi negara disalurkan secara objektif berdasarkan verifikasi data yang saintifik dan akuntabel (OECD, 2020).

7. Simpulan Pembahasan

Aplikasi Cek Bansos terbukti menjadi instrumen esensial dalam mendukung implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Pasaman Barat. Inovasi ini tidak hanya memecahkan masalah jarak dan lambatnya layanan administratif konvensional, tetapi juga berhasil mentransformasi tata kelola data kesejahteraan menjadi lebih partisipatif, transparan, dan multidimensional. Meskipun masih dihadapkan pada pekerjaan rumah berupa pemerataan literasi digital masyarakat dan penguatan kapasitas aparatur nagari, integrasi sistem ini telah memperlihatkan perbaikan nyata dalam mewujudkan distribusi keadilan sosial yang tepat sasaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi Cek Bansos berperan sangat efektif sebagai instrumen katalisator dalam mendukung implementasi awal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan amanat regulasi terbaru. Kehadiran empat fitur utama terintegrasi pada aplikasi yakni Profil Pengguna (untuk akuntabilitas pelapor), Cek Bansos (untuk transparansi *open data*), serta Daftar Usulan dan Tanggapan Kelayakan (sebagai instrumen otonomi warga) telah mentransformasi mekanisme pemutakhiran data yang sebelumnya sentralistik dan birokratis menjadi jauh lebih partisipatif dan transparan.

Kehadiran aplikasi Cek Bansos telah membawa transformasi signifikan dalam tata kelola bantuan sosial di tingkat lokal dengan memperkuat transparansi dan prinsip *open data*. Keterbukaan informasi ini berhasil mengubah peran masyarakat dari yang sebelumnya hanya sebagai penerima manfaat pasif (*beneficiaries*) menjadi pengawas aktif kebijakan (*co-creators*). Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat partisipasi warga yang lebih memilih kepraktisan fitur Usul dan Sanggah dibandingkan harus menempuh jalur birokrasi konvensional. Secara keseluruhan, keterlibatan aktif masyarakat ini terbukti sangat efektif dalam memangkas alur birokrasi, meminimalkan tingkat kesalahan sasaran berupa *inclusion error* maupun *exclusion error*, serta mewujudkan penyelenggaraan negara di sektor sosial yang jauh lebih akuntabel. Selain itu, keberhasilan transisi ke DTSEN di Pasaman Barat menunjukkan bahwa tata kelola bantuan sosial kini mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi, di mana kelayakan penerima manfaat tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi divalidasi melalui sistem pemeringkatan desil oleh BPS dan *ground checking* oleh pendamping sosial.

Secara teoritis, implementasi ini mengonfirmasi keberhasilan penerapan nilai *New Public Service* di era digital, di mana masyarakat diposisikan sebagai kolaborator aktif (*co-creators*). Keterlibatan lintas aktor mulai dari masyarakat, aparatur nagari (melalui verifikasi SPTJM), Dinas Sosial, BPS, hingga Kementerian Sosial membuktikan bahwa perbaikan tata kelola kesejahteraan sosial mutlak membutuhkan sinergi *Collaborative Governance* yang berlandaskan pada prinsip kebijakan berbasis data (*Evidence-Based Policy*).

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang diusulkan guna meningkatkan efektivitas aplikasi Cek Bansos dan implementasi DTSEN secara berkelanjutan:

1. Akselerasi Pemerataan Literasi Digital: Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial perlu memperluas jangkauan *coaching clinic* dan sosialisasi penggunaan keempat fitur aplikasi Cek Bansos. Fokus edukasi harus diprioritaskan bagi masyarakat di daerah pedalaman, wilayah

terisolir, dan kelompok rentan agar tidak terjadi kesenjangan akses layanan digital (*digital divide*).

2. Penguatan Kapasitas Operator dan Aparatur Nagari: Mengingat peran vital pemerintah nagari dalam menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), perlu dilakukan bimbingan teknis secara berkala bagi aparatur nagari dan operator SIKS-NG. Hal ini penting untuk meminimalkan hambatan teknis akibat pergantian personel dan memastikan verifikasi awal di tingkat nagari benar-benar akurat.
3. Penyempurnaan Fitur Pelacakan (Tracking) pada Aplikasi: Kementerian Sosial disarankan untuk terus melakukan pembaruan antarmuka aplikasi (*user interface*) dengan menambahkan fitur *tracking* atau notifikasi status usulan. Dengan demikian, masyarakat yang mengajukan "Usul" atau "Sanggah" dapat memantau sejauh mana laporannya diproses secara *real-time* (misalnya: *Menunggu verifikasi nagari -> Sedang disurvei -> Disetujui/Ditolak*).
4. Peningkatan Sinergitas Lintas Instansi: Komunikasi dan sinkronisasi data antara pendamping sosial di lapangan, Dinas Sosial daerah, dan BPS harus semakin diintensifkan. Pendekatan kemiskinan multidimensi membutuhkan pembaruan data yang cepat agar penentuan desil kesejahteraan rumah tangga selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang paling aktual.
5. Agenda Penelitian Lanjutan: Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji efektivitas aplikasi Cek Bansos menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian terkait *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk mengukur tingkat kepuasan dan kemudahan pengguna, serta uji regresi untuk mengukur persentase penurunan *inclusion/exclusion error* pasca-implementasi DTSN, akan sangat memperkaya literatur administrasi publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. A. (2025). Evaluasi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia periode 2020–2025. *Jurnal Academia Praja*, 9(1), 93–110. <https://doi.org/10.36859/jap.v9i1.5423>
- Alfayn, A. (2022). From e-government to good governance: Examining the impact of digitalization on public service delivery in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19–40. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>
- Astuti, S. J. W. (2026). Collaborative governance for food security policy in Indonesia: Lessons for achieving the SDGs in Asia-Pacific. *Journal of Asian Public Policy*. <https://doi.org/10.1080/21665095.2026.2674596>
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Ciancarini, P., Farina, M., Okonicha, O., Smirnova, M., & Succi, G. (2023). Software as storytelling: A systematic literature review. *Computer Science Review*, 47, 100517.
- Criado, J. I., Guevara-Gómez, A., & Villodre, J. (2021). Digital government and public administration: Innovation, transformation and governance. *Information Polity*, 26(1). <https://doi.org/10.3233/IP-200280>
- Indonesia, K. S. R. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Indonesia, P. R. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2020). *The path to becoming a data-driven public sector*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>



- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 27)*. Alfabeta.
- Wardana, I. G. N. W., & Prabawati, N. P. A. (2024). Efektivitas pelayanan publik dalam perspektif good governance di era digital. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(1). <https://doi.org/10.61292/shkr.178>.